



Polda Bengkulu Buru Pelaku TPPO yang Tewaskan PMI di Jepang

Kompas.com, 17 November 2025, 13:25 WIB

Firmansyah, Irfan Maulana


DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM  
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

BENGKULU, KOMPAS.com - Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Polda Bengkulu memburu pelaku dugaan penipuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyebabkan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terlantar lalu meninggal dunia di Jepang.

Korban bernama Adelia Meysa, dua puluh tiga tahun, asal Desa Kampil, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Saat ini penyidik tengah melakukan investigasi terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.


Adelia diduga menjadi korban salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang tidak bertanggung jawab sehingga membuatnya berangkat secara ilegal dan terlantar di Jepang.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Andy Pramudya Wardana, mengatakan perkara itu diduga kuat masuk kategori pidana TPPO.



Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app

App Store Google Play




"Ada Beberapa **Modus TPPO** yang Menjadi **Kasus Perhatian Publik Tidak Hanya Nasional** Tetapi Internasional dan Merupakan **Bentuk Modern dari Perbudakan**"

Personel Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat (Sosialisasi bahaya TPPO)

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ungkap Kasus Perdagangan Orang Beromset Milyaran

Nawacitalink

Jumat, 21 Februari 2025



Jakarta, -- (Nawacitalink) Satreskrim Polres Pel...

Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia Cermin Praktik TPPO Terus Berkembang

21 OKTOBER 2025 • 3 MENIT BACA • 816



JAKARTA (21 Oktober) Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, prihatin dengan praktik eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa 97 warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Ia menekankan perlunya penguatan terhadap perlindungan dan pengawasan pekerja migran.

"Kasus ini menjadi cermin nyata bahwa praktik eksploitasi manusia dan TPPO terus berkembang, memanfaatkan lemahnya literasi digital dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pekerjaan ilegal di luar negeri," kata Nurhadi dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Sebanyak 97 WNI di Kota Chrey Thum, Kamboja, terlibat kerusuhan karena ingin melarikan diri dari perusahaan penipuan daring tempat mereka bekerja, Jumat (17/10/2025). Peristiwa itu menyebabkan 86 WNI ditahan oleh kepolisian setempat, dan 11 lainnya dirawat di rumah sakit lantaran menalami luka-luka.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Beranda Tentang Kami Produk Hukum

Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar

Selasa, 18 Maret 2025  
Di baca 4341 kali

bagikan berita ke [Bagikan](#) [Post](#)



Pemerintah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penipuan daring (*online scamming*) dari Myawaddy, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama, Selasa (18/03/2025) dan 154 orang pada tahap kedua, Rabu (19/03/2025). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan, pemulangan ini adalah wujud dari kehadiran negara dalam melindungi warganya.

"Sebagaimana perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden menaruh perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja khususnya di luar negeri," kata Budi Gunawan dalam keterangan pers di Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (18/03/2025).

panrb

KEMENTERIAN PENYADAIAN APARATUR NEGARA DAN REFORMA BIROKRASI

BERANDA PROFIL PUBLIKASI



Foto: dok. Divhumas Polri

Jakarta, **InfoPublik** - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 757 laporan selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023. Dari ratusan laporan itu, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang.

"Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan resminya, Senin (14/8/2023).

Ramadhan mengatakan, penegakkan kasus TPPO ini dilakukan atas perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, pengungkapan kasus TPPO menjadi semakin maksimal setelah dibentuk satgas pada 5 Juni 2023 lalu.

Ramadhan menjelaskan, modus yang dilakukan para pelaku TPPO tersebut bervariasi. Salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 516 kasus.

Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang  
Email: [tria2809@gmail.com](mailto:tria2809@gmail.com)

Adapun berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)<sup>2</sup>, terdapat kasus hukum yang menimpa pekerja migran Indonesia sepanjang 2016 berjumlah 4.761 kasus. Sementara di tahun 2017 sebanyak 4.349 kasus. Sedangkan di 2018 sebanyak 3.598 kasus. Dengan demikian, total yang ditangani BNP2TKI sebanyak 12.708 kasus. Adapun data kasus pada bulan April-Juni tahun 2019 memperlihatkan terdapat 1.903 kasus dalam kurun waktu tiga bulan saja. Lemahnya data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus hukum yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia yang dapat merupakan akibat dari rendahnya HCI Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya.



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



UPI

The  
Education  
University



SiPMigran  
Sistem Pekerja Migran

# PERANCANGAN SIMPIGRAN: SISTEM DETEKSI DINI TPPO DAN SMART SURVEILLANCE BERBASIS OLAP DI SEKTOR KEMARITIMAN

---

## Team Sistem Informasi Kelautan



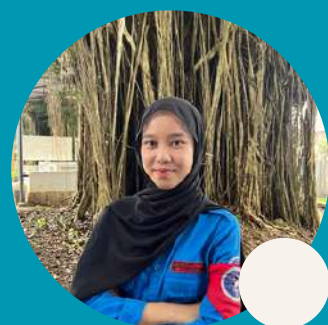
**Fauziyah  
Salsabila**

Ketua



**Sakila Divia  
Fitriyani**

Anggota I



**Linda  
Apriyani**

Anggota II





DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



UPI

The  
Education  
University



SiPMigran  
Sistem Pekerja Migran

# Outline

01. Latar Belakang	04. Metode
02. Analisis	05. Hasil Pembahasan
03. Tujuan dan Manfaat	05. Kesimpulan





# Apa iya TPPO terus terjadi di Indonesia?

Ayo kita pecahkan dengan framework SQC!

## Situation

1. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), lebih dari 60% masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan
2. Sistem pengawasan di pelabuhan masih bersifat konvensional mengandalkan pencatatan manual, CCTV terbatas, dan database yang belum terintegrasi antar instansi
3. Bareskrim Polri (2023), mencatat lebih dari 1.000 kasus TPPO dengan sekitar 3.000 korban

## Complication

1. Jaringan mafia yang terus mencari celah untuk merekrut masyarakat yang rentan menjadi korban, bahkan melibatkan jaringan lintas negara dan oknum lembaga
2. Pengawasan manual saat ini tidak mampu mendeteksi dini serta korban sulit melapor karena belum tersedianya sistem informasi terpusat dan mekanisme pelaporan yang aman

## Question?

1. Bagaimana merancang inovasi digital yang mampu mengintegrasikan perizinan Migran dan proaktif dalam mendeteksi potensi TPPO serta mendukung implementasi SDG's di sektor maritim





DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



UPI

The  
Education  
University



# Bagaimana Datanya?



## Ini Data Kuantitatifnya!

1. Statistik Internasional Organization for Migration (IOM Indonesia, 2023) menyatakan 2% pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dari total 3–4 juta pekerja migran aktif
2. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI, 2023) mengatakan periode Mei 2020-Juni 2023 organisasinya mendokumentasi 1.343 kasus TPPO di Indonesia
3. Temuan Kementerian Luar Negeri dan Bareskrim Polri, mengungkap bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.061 kasus TPPO dengan 3.363 korban (Bareskrim, 2024)
4. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat dari tahun 2021-juni 2025 korban TPPO dewasa perempuan 1.204, korban TPPO anak perempuan 1.003, jumlah korban laki-laki dewasa 39, dan korban anak laki-laki 131
5. Kajian Sistemik Ombudsman RI (2024), terkait lemahnya sistem pengawasan, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi dalam pencegahan TPPO
6. Kemenko PMK (2024), menyatakan tantangan integrasi data dan kebutuhan penguatan sinergi multiaktor dalam mencegah eksploitasi WNI





## Ini Data Kualitatifnya



“Praktik penyelundupan manusia dan TPPO dilakukan oleh jaringan mafia yang terus mencari celah untuk merekrut masyarakat yang rentan menjadi korban.”


Jenderal Listyo Sigit Prabowo  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



“Modus TPPO makin kompleks, menggunakan dokumen palsu dan memanfaatkan pelabuhan kecil untuk menghindari sistem deteksi.”

Silmy Karim  
Dirjen Imigrasi

“Komitmen pemerintah dalam memberantas TPPO diwujudkan dengan menghadirkan payung hukum. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan peraturan turunan lainnya. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) di tingkat pusat maupun daerah juga telah dibentuk.”



Arifah Fauzi  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)





## Lantas Bagaimana?

### Intinya!

Dari data kuantitatif dan kualitatif yang ada, dapat dikatakan bahwa Kasus TPPO di Indonesia masih menjadi permasalahan dan PR yang belum juga selesai sehingga membutuhkan perhatian khusus. Maka dari itu, **SIPMIGRAN** hadir sebagai solusi nyata yang dirancang untuk menekan kasus TPPO terkhusus di pelabuhan yang ada di Indonesia





# Apa itu SIPMIGRAN?



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



UPI

The  
Education  
University



SiPMigran  
Sistem Pekerja Migran

## Pengertian

SiPMigran (Sistem Pekerja Migran) dirancang sebagai solusi sistem berbasis web/mobile yang mengintegrasikan data perizinan perusahaan perekrut, proses pendaftaran, verifikasi, pelacakan, dan pelaporan bagi ABK/TKI serta pelacakan perjalanan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur smart surveillance yang mampu mengenali pola anomali seperti keterlambatan perjalanan atau rute yang mencurigakan.

## Tujuan

- Menilai kelemahan sistem pengawasan TPPO konvensional di pelabuhan, termasuk keterbatasan CCTV, proses manual, dan database yang terpisah.
- Merancang sistem deteksi TPPO berbasis teknologi digital/AI yang mendukung verifikasi, pelacakan, dan pemantauan real time.
- Mengidentifikasi kontribusi sistem terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 8, 9, dan 16).

## Manfaat

- Meningkatkan efektivitas pengawasan TPPO melalui integrasi data dan deteksi dini yang lebih akurat.
- Mendorong modernisasi pengawasan pelabuhan melalui penerapan Smart Surveillance dan analitik risiko.
- Memperkuat perlindungan ABK/PMI dengan sistem pemantauan yang transparan, cepat, dan responsif.
- Memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi digital dalam upaya penanggulangan TPPO di tingkat nasional dan internasional.





# SIPMIGRAN dukung Implementasi SDG's?

## SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

SiPMigran mendukung terciptanya kondisi kerja yang aman dan adil bagi ABK dan Pekerja Migran Indonesia dengan mencegah eksploitasi sejak tahap perekrutan. Sistem ini memastikan bahwa setiap pekerja yang diberangkatkan telah melalui proses verifikasi dokumen, perizinan yang sah, serta pemantauan perjalanan secara real time. Dengan mengurangi potensi TPPO dan praktik tenaga kerja tidak layak, SiPMigran memperkuat perlindungan pekerja migran di sektor maritim.

## SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure)

SiPMigran menawarkan inovasi baru dalam membangun infrastruktur pengawasan pekerja migran yang bersifat digital, terintegrasi, dan prediktif. Dengan menggabungkan database lintas lembaga, pelacakan rute, hingga smart surveillance berbasis analitik risiko, sistem ini meningkatkan efisiensi dan keandalan pengawasan maritim. Integrasi teknologi modern menjadikan proses monitoring lebih cepat, transparan, dan responsif.

## SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)

SiPMigran memperkuat tata kelola dan transparansi dalam penanggulangan TPPO dengan menyediakan mekanisme pelaporan digital, verifikasi otomatis, dan pemantauan perjalanan yang akurat. Fitur notifikasi risiko dan alur pemeriksaan yang terdokumentasi membantu lembaga pemerintah mengurangi celah penyalahgunaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan perlindungan yang adil bagi setiap individu.

### JADI?

SiPMigran tidak hanya menyelesaikan permasalahan TPPO, tetapi juga memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui modernisasi sistem pengawasan, perlindungan pekerja, serta peningkatan kolaborasi lintas lembaga.





# Fitur SIPMIGRAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK

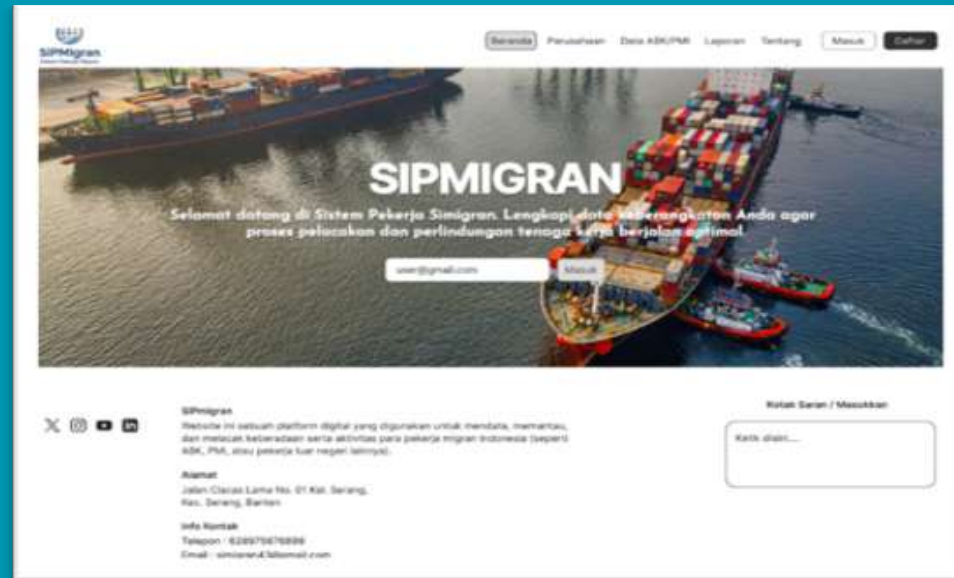


UPI

The Education  
University



SiPMigran  
Sistem Pekerja Migran



## Halaman Beranda

Menyediakan navigasi cepat ke fitur-fitur inti. Dilengkapi "Kotak Saran/Masukkan" di bagian bawah. Dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerima masukan dari publik atau pengguna yang ingin berkontribusi pada perbaikan sistem.



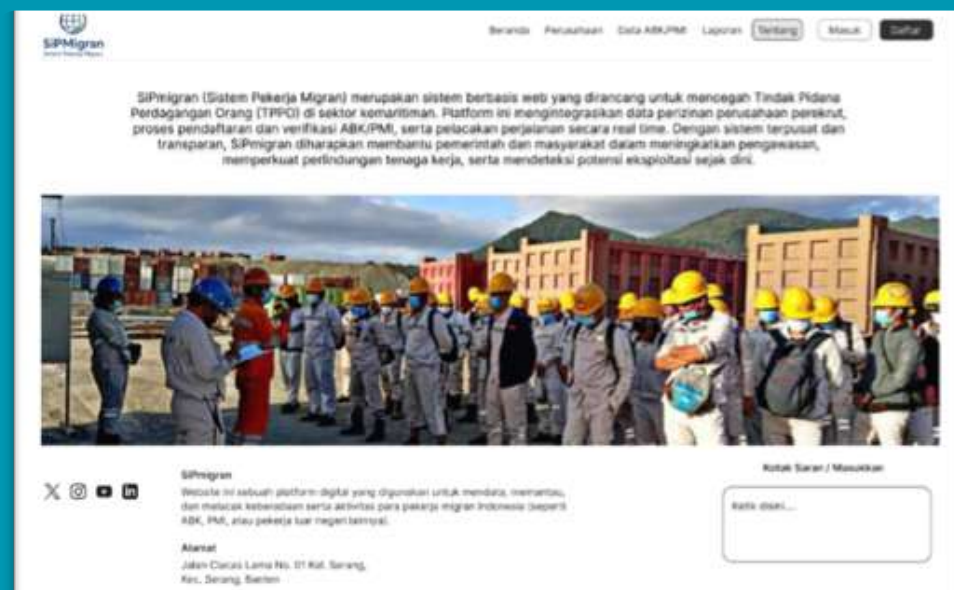
## Halaman Masuk Akun

Halaman ini memastikan keamanan dan otorisasi akses ke sistem SiPMigran. Digunakan oleh Admin (untuk pemantauan dan verifikasi) dan Pengguna/Perusahaan (untuk mengakses dashboard masing-masing).



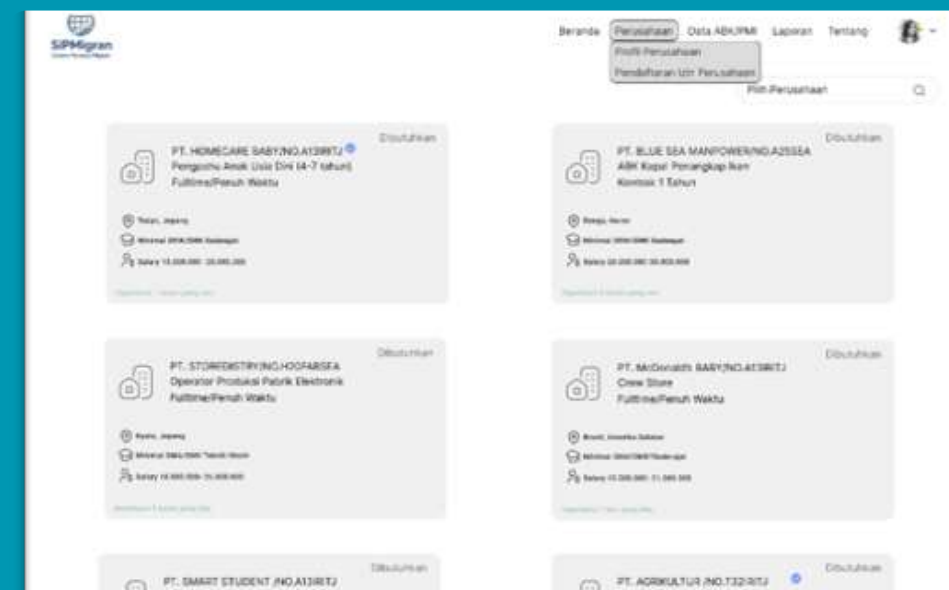
## Halaman Daftar Akun

Halaman ini memastikan keamanan dan otorisasi akses ke sistem SiPMigran. Digunakan oleh Perusahaan Perekrut (untuk mendapatkan izin) dan Pengguna/PMI/ABK (untuk memulai pencatatan data perjalanan).



## Halaman Tentang

Halaman ini adalah sumber informasi publik yang menjelaskan tujuan, fungsi, dan latar belakang SiPMigran, menegaskan peran sistem dalam pencegahan TPPO dan migrasi aman.



## Halaman Profil Perusahaan

Halaman ini menampilkan data detail perusahaan perekrut yang terdaftar di sistem. Menyediakan informasi dasar dan daftar lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan tersebut.



## Halaman Perizinan Perusahaan

Halaman ini adalah mekanisme verifikasi legalitas krusial dalam pencegahan TPPO. Perusahaan memasukkan data izin mereka. Data ini diverifikasi langsung oleh Admin. Status izin baru akan berubah menjadi "Terverifikasi" setelah melalui persetujuan oleh admin.



# Fitur SIPMIGRAN



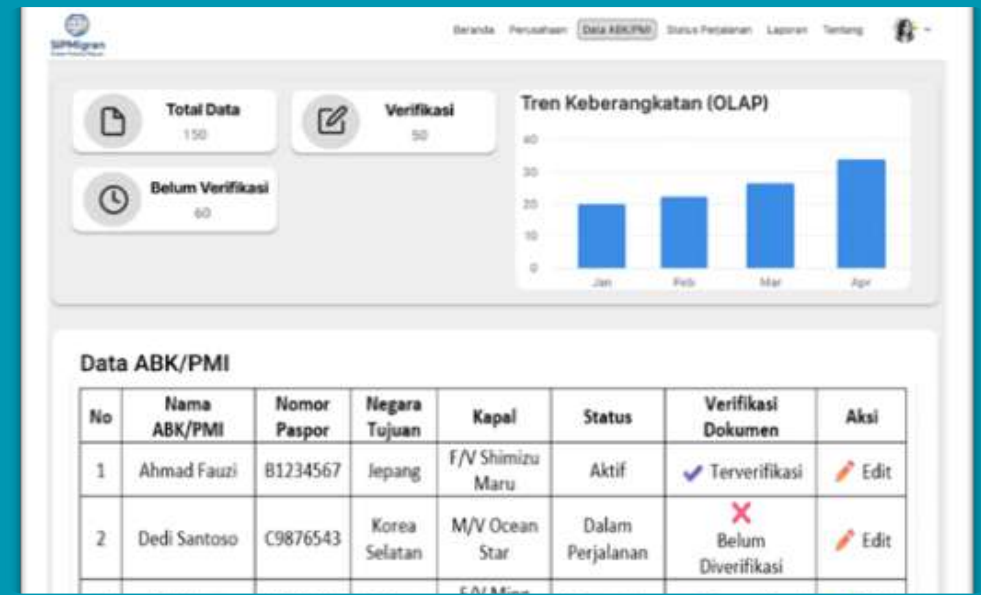
Halaman Formulir Pengisian Data

Halaman ini adalah input fungsional utama sistem, diisi oleh Pengguna/PMI/ABK. Mengumpulkan dan menyimpan data primer pekerja. Data ini menjadi basis awal untuk proses pelacakan perjalanan.



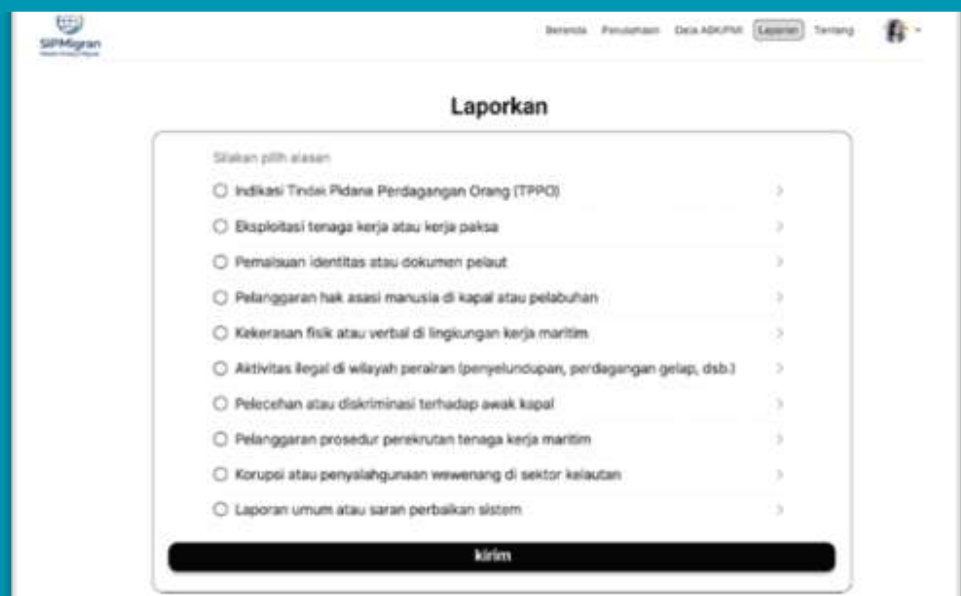
Halaman Pelaporan Kedatangan

Halaman ini adalah fitur krusial yang mengaktifkan Fitur Pelacakan dan Smart Surveillance. Pengguna/PMI/ABK wajib melaporkan "Tanggal Kedatangan" dan "Status Kedatangan" di negara tujuan. Data ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi anomali waktu perjalanan



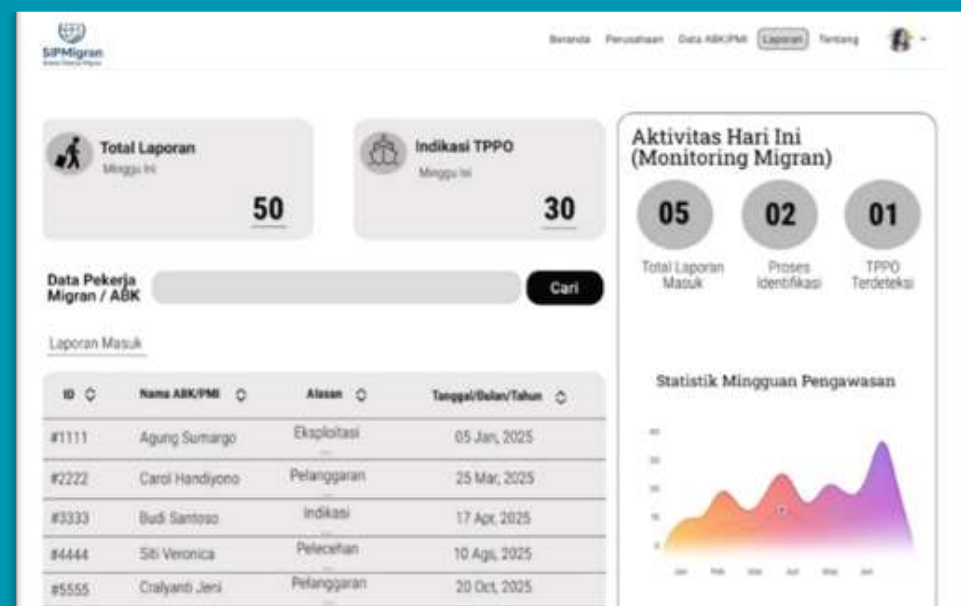
Halaman Data ABK/PMI Admin

Dashboard dilengkapi Grafik Analisis Multidimensi yang memungkinkan admin/pemangku kepentingan mengidentifikasi tren keberangkatan dan pola anomali waktu untuk pengambilan keputusan strategis pencegahan TPPO.



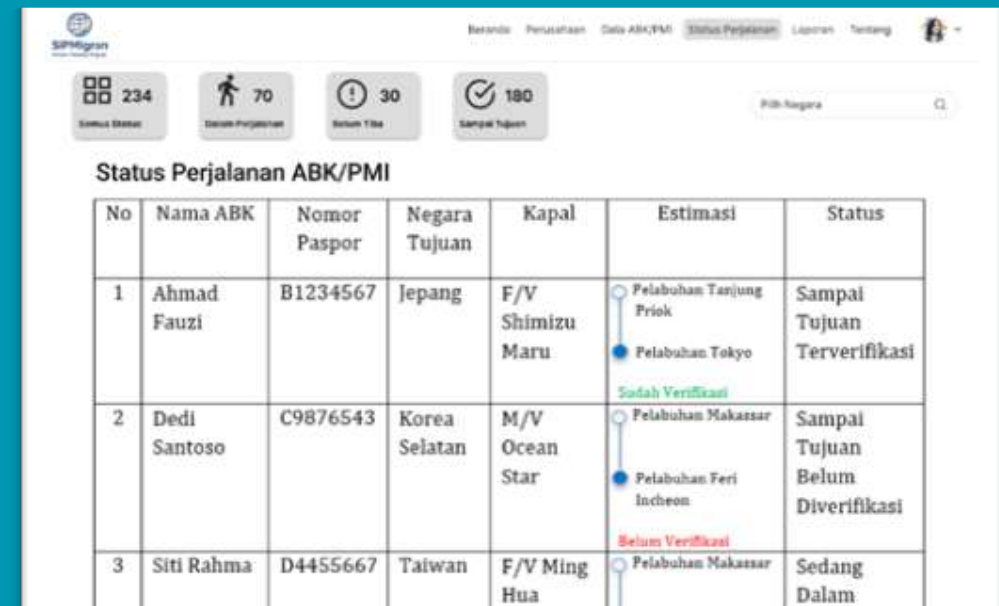
Halaman Laporan (Pegguna)

Fitur deteksi dini yang melibatkan partisipasi publik dan pekerja. Pengguna dapat secara langsung melaporkan "indikasi TPPO" atau "pelanggaran hak asasi manusia" yang mereka alami atau saksikan.



Halaman Laporan Admin

Halaman ini berfungsi sebagai pusat komando untuk mengelola semua insiden dan deteksi. Mengumpulkan semua laporan yang masuk dari pengguna. Sehingga administrator dapat menindaklanjuti, dan melacak status yang terdeteksi sistem.

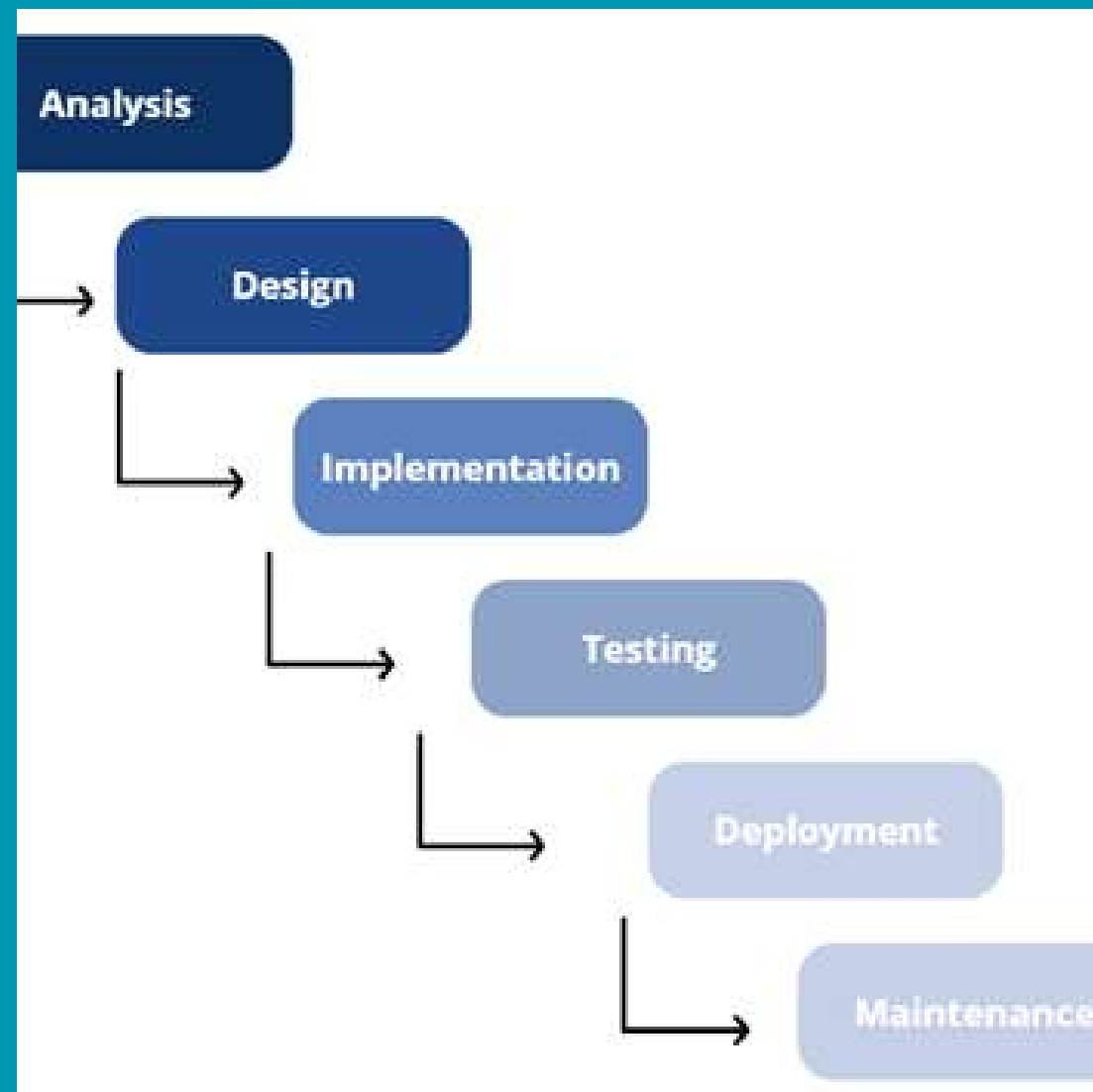


Halaman Status Perjalanan

Halaman ini adalah visualisasi utama dari fitur Smart Surveillance dan pelacakan. Menampilkan status perjalanan setiap ABK/PMI. Admin dapat segera melihat potensi masalah dan memicu proses investigasi atau koordinasi dengan pihak terkait.



# Tahapan Pengembangan SIPMIGRAN



Metode Waterfall

1. Perencanaan — tujuan, cakupan proyek, pemangku kepentingan, dan timeline.
2. Analisis Kebutuhan — kumpulkan kebutuhan fungsional & nonfungsional; buat user story/flow.
3. Desain — wireframe & UI/UX; desain arsitektur sistem dan ERD/database.
4. Pengembangan (Build) — coding front-end & back-end, integrasi API, konfigurasi database.
5. Pengujian (Testing) — unit, integrasi, UAT; perbaikan bug dan penyesuaian.
6. Deployment — pasang ke server/hosting, konfigurasi domain & SSL, cek performa.
7. Pemeliharaan & Evaluasi — monitoring, backup, update fitur, evaluasi feedback pengguna.





# Siapa Saja yang Terlibat?



Sebagai penegak hukum utama, Polri berperan penting dalam pencegahan dan penindakan kasus TPPO. Melalui data investigasi, laporan pelanggaran, dan analisis rute mencurigakan, Polri menjadi pihak kunci dalam memanfaatkan fitur pelacakan perjalanan dan sistem peringatan dini SiPMigran untuk mengidentifikasi potensi perdagangan orang di sektor maritim.



Perusahaan perekrut ABK/PMI menjadi ujung tombak dalam menjamin proses rekrutmen yang aman, legal, dan akuntabel melalui SiPMigran, sehingga potensi TPPO dapat dicegah sejak tahap paling awal.



KEMENHUB: mengatur regulasi pelabuhan, keamanan perjalanan, perizinan kapal, dan pengawasan keluar-masuknya ABK. KOMINFO: mendukung aspek infrastruktur digital, keamanan data, dan integrasi sistem nasional. KEMENLU: berperan dalam diplomasi internasional terkait perlindungan PMI, serta koordinasi penanganan kasus TPPO lintas negara. Ketiga lembaga ini memastikan bahwa SiPMigran berjalan sesuai standar hukum, teknologi, dan kerja sama global.



Universitas berkontribusi dalam evaluasi sistem, peningkatan akurasi deteksi risiko, keamanan data, serta pengembangan fitur AI. Mereka menilai peluang pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan efektivitas SiPMigran dan menganalisis kontribusinya terhadap pencapaian SDGs sektor ketenagakerjaan dan keamanan maritim.



BP2MI bertanggung jawab atas pendataan, perlindungan, dan verifikasi keberangkatan resmi pekerja migran. Dengan adanya SiPMigran, BP2MI berperan sebagai pengelola data legalitas dokumen, status keberangkatan, serta penghubung ke shelter bagi pekerja migran yang terindikasi risiko. Sistem verifikasi digital memudahkan proses cross-check dokumen ABK/PMI.



Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai pengawas sosial dan sumber informasi lapangan terkait praktik perekrutan ilegal, percaloan, dan potensi TPPO di daerah pesisir. Mereka juga menjadi penerima manfaat dari meningkatnya keamanan dan transparansi proses migrasi melalui SiPMigran.



# Kesimpulan

## Situation

Lebih dari 60% masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pesisir sehingga rentan terhadap praktik TPPO, terutama ABK dan PMI. Sistem pengawasan pelabuhan masih bersifat manual, tidak terintegrasi, dan tidak mampu melakukan deteksi dini. Sehingga kasus TPPO terus meningkat, tercatat lebih dari 1.000 kasus dan 3.000 korban pada 2023.

## Complication

- Data dan Sistem Tidak Terintegrasi  
Informasi perusahaan, dokumen legalitas, dan data ABK/PMI tersebar di banyak instansi sehingga rawan manipulasi dan sulit diverifikasi.
- Deteksi Dini Lemah  
Sistem pengawasan konvensional tidak memiliki analitik, sehingga perubahan rute, keterlambatan, atau pola perjalanan mencurigakan tidak dapat dideteksi secara otomatis.
- Pelaporan Kasus TPPO Tidak Terpusat  
PMI/ABK tidak memiliki platform aman untuk melaporkan indikasi perdagangan orang secara cepat, menyebabkan banyak kasus terlambat ditangani.

## Solution

SiPMigran (Sistem Pekerja Migran) dirancang sebagai sistem berbasis web/mobile yang:

- Mengintegrasikan data perizinan perusahaan, verifikasi dokumen, dan data ABK/PMI.
- Menyediakan fitur pelacakan perjalanan dan konfirmasi kedatangan secara real time.
- Memiliki modul pelaporan indikasi TPPO oleh pengguna.
- Dilengkapi smart surveillance dan desain struktur data berbasis OLAP, sehingga mampu mendeteksi anomali seperti keterlambatan atau perubahan rute tidak wajar.
- Dirancang menggunakan metode Waterfall yang menghasilkan rancangan sistem (UI/UX & ERD) siap implementasi.





# Referensi

- Maricar NPK, Atman W. 2025. Transformasi Keamanan Maritim Indonesia melalui Penerapan Teknologi Blockchain. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*. 2(3): 84–101.
- Primastito AM. 2024. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Tarigan S, Batubara S. 2024. Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web dengan Metode Waterfall. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*. 4(2): 92–99.
- Ardiansyah, A. and Albanna, F., 2022. Analisis Pemeliharaan pada Kendaraan Operasional PKP-PK di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), pp.19-28.
- Wahid, A.A., 2020. Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. *J. Ilmu-ilmu Inform. dan Manaj. STMIK*, no. November, 1(1), pp.1-5.
- Fauzi, R., Wibowo, S., & Putri, D. Y. 2018. Perancangan Aplikasi Marketplace Jasa Percetakan Berbasis Website. *Fountain of Informatics Journal*, 3(1), 5-11.
- Syahfitri, A., & Suendri, S. 2025. Penerapan Business Intelligence pada Jenis Bisnis Peluang Usaha UMKM di Desa Silenduk Menggunakan Teknologi Online Analytical Processing. *TEKNIKA*, 19(1), 315-326
- Tribrata News. 2023. Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023. Available at: <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/> (Accessed: 6 November 2025).
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2023. Annual Report: Human Trafficking and Labour Migration Trends. Jakarta: IOM Indonesia. Available at: <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/2024-07/iom-indonesia-2023-year-in-review.pdf> (Accessed: 6 November 2025).
- Syarifudin, T. 2024. Menteri P2MI: Kasus Pekerja Migran Indonesia, 95% Berasal dari Unprocedural. *detikNews*, 27 Desember. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-7705136/menteri-p2mi-kasus-pekerja-migran-indonesia-95-berasal-dari-unprocedural> (Accessed: 6 November 2025).
- Easterita, B. K., Arwani, I., & Ratnawati, D. E. 2020. Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical Processing (OLAP) untuk Data Artikel pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK). *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Edukasi Sistem Informasi*, 1(1).